

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021

Oleh

RASTHI MILANIE PUTRI

Salah satu elemen kunci manajemen keuangan yang berupaya memenuhi kebutuhan operasional lembaga pemerintah adalah pengadaan produk dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2021. Temuan studi membuktikan jika pengadaan barang dan jasa oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan barang dan jasa, termasuk seluruh tahapan kebutuhan, meliputi perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan, dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan menggunakan uang APBN/APBD. Menurut peraturan presiden tersebut, untuk menghindari masalah seperti korupsi dan menjamin tidak ada pihak yang terpengaruh, pengadaan produk dan layanan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Perencanaan aset daerah akan menjadi acuan perencanaan kebutuhan dengan cara yang dianggap efektif dan efisien. Laporan Akhir ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen.

Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021, Transparansi, Efektifitas, Akuntabilitas.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT AT THE SECRETARIAT OF THE LAMPUNG PROVINCIAL LEGISLATURE BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NO 12 OF 2021

By

RASTHI MILANIE PUTRI

One of the key elements of financial management that seeks to meet the operational needs of government agencies is the procurement of products and services. This study aims to determine how the implementation of goods and services procurement of the Lampung Provincial DPRD Secretariat is in accordance with Presidential Regulation No. 12 of 2021. The study findings prove that the procurement of goods and services by the Lampung Provincial DPRD Secretariat has been carried out in accordance with the guidelines set out in Presidential Regulation No. 12 of 2021. Procurement of goods and services, including all stages of needs, including planning, preparation, and implementation, is carried out by ministries, institutions, and local governments using APBN/APBD money. According to the presidential regulation, to avoid problems such as corruption and guarantee that no party is affected, procurement of products and services must be carried out responsibly and transparently. Regional asset planning will be a reference for planning needs in a way that is considered effective and efficient. This Final Report applies descriptive qualitative method by collecting data through interviews and documents.

Keywords: Goods and Services Procurement, Presidential Regulation No. 12 of 2021, Transparency, Effectiveness, Accountability.